

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang didapatkan dari suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi Manajer maupun *Stakeholder*. Sehingga pada penyampaian laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan harus menunjukkan informasi yang benar, bebas salah saji material dan akurat serta bebas dari kegiatan pemanipulasian angka-angka akuntansi. Manajer memiliki informasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan dilaporkan kepada pemilik perusahaan serta pihak eksternal seperti investor, kreditur dan masyarakat umum.

Seiring berkembang pesatnya pasar modal di Indonesia, hal tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan akan kebutuhan informasi keuangan perusahaan *go public* atau perusahaan yang tercatat di Bursa Efek bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna untuk pengambilan keputusan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan tersebut seperti pihak manajemen, investor, kreditur.

Salah satu sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan adalah laporan keuangan perusahaan *go public*. Laporan keuangan tersebut

berisi informasi keuangan yang menggambarkan kondisi perusahaan sehingga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan pengertian dan tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009) yaitu bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memantau kinerja perusahaan ialah laporan keuangan perusahaan *go public* tersebut.

Informasi yang terdapat di laporan keuangan sangat penting bagi pemakai laporan keuangan sehingga perusahaan dalam penyajian laporan keuangan harus memenuhi kriteria-kriteria bagi pemakai laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 1 Paragraf ke 15 Point B (Revisi 2009) terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam penyajian laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami.

Ketepatan waktu menjadi salah satu kendala dalam pelaporan keuangan agar dapat memenuhi kriteria dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan akan hilang nilai informasinya, jika penyajian laporan keuangan tersebut tidak tepat waktu sehingga akan memengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Ketepatan waktu telah diatur dalam peraturan nomor X.K.2 pada keputusan ketua Bapepam-LK nomor: kep-346/bl/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 5 Juli 2011. Peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban emiten atau perusahaan publik untuk melakukan pelaporan dan pengumuman laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit kepada Bapepam-LK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat dengan batas waktu pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Disamping itu, seiring dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diakhir tahun 2011, OJK mengambil alih tugas dan tanggung jawab Bapepam-LK terhitung tanggal 31 Desember 2012. OJK menyusun Peraturan nomor 29 /POJK.04/2016 pada pasal 7 ayat (1) tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang berisi tentang kewajiban emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit kepada OJK dengan batasan waktu yaitu pada akhir bulan keempat sesudah tahun buku berakhir. Oleh karena itu, setiap emiten atau perusahaan publik wajib untuk menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit kepada OJK dengan ketentuan waktu yang telah diatur sehingga mempunyai dampak terhadap peningkatan permintaan laporan keuangan auditan.

Laporan keuangan yang sudah diaudit ialah salah satu bentuk tanggungjawab manajemen kepada investor dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan tersebut berisi opini atas wajar atau

tidaknya suatu laporan keuangan oleh auditor eksternal yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Hal ini dibuktikan pada kasus pelanggaran yang dilakukan PT Bank Lippo Tbk pada tahun 2002 yang laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan belum diaudit, namun mencantumkan bahwa laporan keuangan tersebut sudah diaudit. Hal ini berdampak pada Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih yang merupakan partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja karena terlambat menyampaikan peristiwa penting dan material mengenai penurunan nilai Agunan Yang Diambil Alih-bersih (AYDA). Baik PT Bank Lippo Tbk maupun KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dikenakan sanksi administratif sebagai konsekuensi dan tanggung jawab dari kelalaian yang dilakukannya. Oleh karena itu, konsekuensi yang juga dikenakan Kantor Akuntan Publik tersebut memacu auditor untuk bekerja secara lebih profesional.

Fenomena yang ada di Indonesia saat ini ialah BEI mencatat bahwa perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2012 ialah sebanyak 52 perusahaan, perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2013 ialah sebanyak 57 perusahaan, perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014 ialah sebanyak 49 perusahaan, dan perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2015 ialah sebanyak 63 perusahaan. Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun.

Selain itu, sebanyak 18 perusahaan yang dibekukan oleh BEI karena tidak juga segera menyampaikan laporan keuangan auditan per Desember 2015 sehingga dikenakan sanksi administratif dan penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham. Dari 18 perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan auditan tersebut paling banyak berada di industri pertambangan yaitu 7 dari 18 perusahaan dengan persentase sebesar 38,89%. Disamping itu, terdapat 17 perusahaan yang disuspensi karena tidak juga segera menyampaikan laporan keuangan auditan per Desember 2016. Sebanyak 6 dari 17 perusahaan merupakan perusahaan pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sedikit perusahaan yang sudah mendapat peringatan namun tidak juga segera menyampaikan laporan keuangan auditan perusahaan sehingga dikenakan sanksi administratif maupun suspensi.

Berdasarkan uraian fenomena terhadap perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan, hal tersebut bisa dikaitkan dengan *audit report lag* (ARL). ARL adalah jangka waktu penyelesaian audit dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan audit (Afify,2009). Selain itu, disatu sisi auditor harus tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditan kepada OJK, dan disisi lain adanya pemenuhan standar audit yang mana terdapat beberapa prosedur pada pekerjaan lapangan audit yang memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga menyebabkan lamanya laporan audit yang dikeluarkan dari batas waktu yang telah ditetapkan.

Masalah tersebut dapat dikurangi dengan pelaksanaan *Corporate Governance*. Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Forum for *Corporate governance* in Indonesia (FCGI, 2006) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh yang dianggap sebagai suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang diharapkan *audit report lag* dapat berkurang. Penelitian ini mengacu pada penelitian Swami dan Latrini (2013) mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *audit report lag* yang mana *audit report lag* sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen terdiri atas kepemilikan manajerial, dewan komisaris, kepemilikan institusional, keberadaan komite audit.

Kepemilikan Manajerial merupakan salah satu bagian dari mekanisme *corporate governance*. Menurut Swami dan Latrini (2013) adanya saham yang dimiliki oleh direksi, manajer, dan dewan komisaris tersebut akan dapat memotivasi pihak manajemen untuk selalu berusaha meningkatkan nilai perusahaan dengan memperbaiki kinerja manajemen agar dapat memberikan citra positif dengan segera melakukan penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian Swami dan Latrini (2013)

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Narayana (2017) dan Arifah dan Lestari (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Namun, berbeda pada penelitian Philo (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *audit delay*. Budiasih dan Saputri (2014) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecepatan publikasi. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh Jumagiarti (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kepemilikan Institusional merupakan salah satu bagian dari mekanisme *corporate governance*. Menurut Swami dan Latrini (2013) adanya saham yang dimiliki oleh pihak institusi lain dapat menuntut penyelesaian laporan keuangan auditan dengan segera karena investor institusional yang menanamkan sahamnya memiliki potensi untuk memengaruhi kegiatan manajemen secara langsung melalui kepemilikan saham mereka di perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian Swami dan Latrini (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Penelitian tersebut didukung oleh Suparsada dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Adriyani (2017) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh

terhadap *internet financial reporting*. Namun, berbeda pada penelitian Sukarman (2015), Mirtafianti (2016) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan..

Dewan Komisaris Independen merupakan salah satu bagian dari mekanisme *corporate governance*. Menurut Swami dan Latrini (2013) adanya dewan komisaris independen dengan persentase yang tinggi diindikasikan dapat mengawasi perilaku *opportunistic* manajemen, mengungkapkan kualitas pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan dan mengurangi manfaat dari penyembunyian informasi. Hasil dari penelitian Swami dan Latrini (2013) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Penelitian tersebut didukung oleh Adrian (2015) berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Adriyani (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *internet financial reporting*. Namun, berbeda pada penelitian Naimi (2010), Wardhani (2013), Kuslihaniati (2016) yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Keberadaan Komite Audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme *corporate governance*. Menurut Swami dan Latrini (2013), keberadaan komite audit membantu dewan komisaris dalam memastikan konsistensi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama

transparansi oleh para eksekutif. Adanya komite audit diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik dalam pelaporan keuangan serta meningkatkan kualitas audit. Keberadaan komite audit diukur dengan menggunakan jumlah keseluruhan komite audit. Namun, hasil penelitian yang dilakukan Swami dan Latrini (2013) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Begitu pula Wardhani (2013) dan Lay (2017) mengungkapkan bahwa keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Namun, berbeda dengan penelitian Wijaya (2010), Aritonang (2016), dan Pratama (2017) yang mengungkapkan bahwa keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan adanya *inkonsistensi* dalam hasil penelitian diatas karena menunjukkan perbedaan hasil penelitian antara penelitian yang dilakukan Swami dan Latrini (2013) dengan peneliti lainnya. Adanya penambahan variabel independen yakni Kompetensi Anggota Komite Audit merupakan perbedaan antara penelitian Swami dan Latrini (2013) dengan penelitian ini.

Alasan adanya penambahan variabel Kompetensi Anggota Komite Audit adalah anggota komite audit yang kompeten atau ahli dibidang Akuntansi dan Keuangan akan memunculkan persepsi bahwa dengan pengetahuannya akan dapat mencegah dan mendeteksi salah saji material yang diharapkan akan mengurangi *audit report lag* (Wardhani,2013). Pada penelitian Wardhani (2013) menyatakan bahwa kompetensi anggota

komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Penelitian tersebut didukung oleh Wijaya (2010) dan Lay (2015), yang mengungkapkan bahwa kompetensi anggota komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Namun, berbeda pada penelitian Naimi (2010) dan Pratama (2017) tidak memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Audit Report Lag* (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)”**. Mekanisme *Corporate Governance* tersebut terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kompetensi anggota komite audit.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* ?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* ?
3. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* ?

4. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* ?
5. Apakah Kompetensi Anggota Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menemukan bukti empiris dari Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Report Lag*.
2. Menguji dan menemukan bukti empiris dari Kepemilikan Institusional terhadap *Audit Report Lag*.
3. Menguji dan menemukan bukti empiris dari Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag*.
4. Menguji dan menemukan bukti empiris dari Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*.
5. Menguji dan menemukan bukti empiris dari Kompetensi Anggota Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tambahan bagi pengembangan teori perilaku di dalam literatur akuntansi

menyangkut mekanisme *corporate governance* yang mempengaruhi *audit report lag* dalam lingkungan *auditing*. Penelitian ini pun dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan terkait *auditing* khususnya *audit report lag*.

2. Manfaat untuk Bidang Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan baru, pengertian dan pemahaman lebih mendalam bagi para auditor atau para praktisi akuntansi maupun akuntan profesional tentang hubungan mekanisme *corporate governance* yang meliputi antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan kompetensi anggota komite audit dengan *audit report lag*.

Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan tambahan informasi dalam penyusunan strategi untuk menyusun laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip *corporate governance* agar mampu mendorong tercapainya kinerja bisnis yang optimal melalui pengendalian *audit report lag* agar dengan pelaporan keuangan auditan yang tepat waktu sehingga kualitas laporan keuangan menjadi semakin baik dan mendukung keputusan investasi dari para pemakai informasinya.

